



## ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP DISKURSUS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR DI MEDIA ONLINE

Shiddiq Sugiono  
Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia  
Salemba, Jakarta Pusat  
No. HP: 08561234988  
e-mail: sugionoshiddiq@gmail.com

Naskah diterima tanggal 6 Januari 2020, direvisi tanggal 20 Mei 2020  
disetujui tanggal 27 September 2020

### Abstrak

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai selalu menuai pro dan kontra. Media dalam hal ini memegang peranan penting dalam menciptakan citra PLTN. Adapun saat ini media *online* turut menjadi wadah untuk mengomunikasikan diskursus pembangunan PLTN. Melalui paradigma kritis, penelitian ini memiliki asumsi bahwa diskursus yang dibangun oleh media *online* turut dipengaruhi oleh berbagai macam pihak dan dimensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana diskursus pembangunan PLTN dibingkai oleh media, menggambarkan intervensi berbagai aktor serta dimensi sosial dan budaya dalam memproduksi diskursus tersebut. Analisis wacana kritis model Norman Fairclough diaplikasikan pada beberapa diskursus pembangunan PLTN untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Selain itu, analisis *framing* W. A. Gamson digunakan dalam menganalisis dimensi teks sehingga dapat dilihat *package* atau tema dalam suatu diskursus. Penelitian ini menyajikan 5 *package* mengenai bingkai diskursus mengenai pembangunan PLTN dari berbagai media online. Adapun penelitian ini menggambarkan adanya indikasi mengenai campur tangan industri batu bara terhadap produksi diskursus. Pemerintah turut memberikan andil karena mempunyai relasi kekuasaan dengan industri batu bara yang menopang program kerjanya. Selain itu, praktik diskursus ini turut didukung oleh adanya konglomerasi dan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Penelitian selanjutnya dapat memetakan bagaimana kekuatan media yang pro dan kontra terhadap pembangunan PLTN melalui pendekatan kuantitatif.

**Kata-kata Kunci :** analisis wacana kritis; kekuasaan industri; konstruksi realita; diskursus media

### Abstract

*The construction of nuclear power plants (NPP) is considered to always reap the pros and cons. The media in this case plays an important role in creating the image of the NPP. Nowadays online media is also a place to communicate the discourse of the construction of NPP. Through a critical paradigm, this research assumes that the discourse built by online media is also influenced by various parties and dimensions. The purpose of this study is to see how the discourse of nuclear power plant construction is framed by the media, describing the interventions of various actors as well as the social and cultural dimensions in producing the discourse. Critical discourse analysis of Norman Fairclough's model was applied to several discourses of the construction of nuclear power plants to achieve the research objectives. W. A. Gamson's framing analysis is used in analyzing text dimensions so that packages or themes can be seen in a discourse. This study presents 5 packages on the discourse frame regarding the construction of NPP from various online media. As for this research, there is an indication that coal industry interferes with discourse production. The government also contributes because it has power relations with the coal industry that supports its work program. In addition, the practice of this discourse is also supported by the existence of conglomerates and the use of power by the government. Future research can map the strengths of the media, the pros and cons of NPP development through a quantitative approach.*

**Keywords:** Critical Discourse Analysis; Industrial Power; Reality Construction; Media Discourse

## Pendahuluan

Media, khususnya media massa, memegang peran penting dalam mengkonstruksi citra dari pembangunan PLTN melalui suatu diskursus. Dalam suatu penelitian mengenai survei terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan warga Jepang terhadap PLTN menyatakan bahwa kepercayaan pada informasi yang terima oleh media massa menjadi variabel yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan (Cravioto et al., 2011: 59). Selain itu, beberapa media massa di Jepang dalam hal ini membingkai suatu kecelakaan nuklir menjadi berita yang memiliki *tone* positif sehingga membentuk konstruksi sosial yang baik mengenai suatu PLTN (Abe, 2013: 1974). Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka media harus menyajikan suatu konstruksi yang baik mengenai PLTN jika memang akan dibangun di Indonesia.

Urgensi dari pembangunan PLTN di Indonesia didasari karena mulai menipisnya energi fosil yang sampai saat ini menjadi penopang utama bagi pembangkit listrik (Robertua, 2017). Rencana pembangunan PLTN di Indonesia sendiri sudah dimulai pada tahun 1970-an. Namun sampai saat ini impian tersebut harus runtuh karena penolakan dari warga yang tidak bisa dibendung. Polemik mengenai isu pembangunan PLTN di Indonesia dirasa selalu menemui penolakan dari masyarakat. Di dalam suatu artikel berita, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penolakan masyarakat berakar dari suatu masalah dimana mereka selalu ditakut-takuti mengenai kecelakaan-kecelakaan PLTN di berbagai belahan dunia (Syahrani & Lubis, 2019). Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia, karena

sejatinya kesuksesan pembangunan PLTN sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat (Suhaemi, 2017: 36). Jika memang media yang berada dibalik semua penolakan ini, kita perlu memberikan suatu kecurigaan bahwa ada pihak-pihak yang memanipulasi bentuk dari diskursus mengenai PLTN.

Mengacu pada kondisi yang telah disampaikan, kajian ini disusun karena munculnya suatu kecurigaan mengenai ketidakberesan sosial pada relasi kekuasaan industri-industri pertambangan di Indonesia dengan pihak media. Bagaimana tidak ? beberapa media menyebutkan bahwa pembangunan PLTN hanya bisa dilakukan jika seluruh persediaan sumber energi di Indonesia telah habis (Kusuma, 2015). Selain itu, Batu bara selalu dibahasakan sebagai sumber daya yang mampu mencukupi kebutuhan listrik Indonesia. Pembangkit listrik melalui batu-bara terus diwacanakan sebagai sumber yang baik-baik saja atau memiliki berbagai resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan PLTN. Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa industri batu bara sebagai pemasok energi yang sedang berkuasa masih ingin melanjutkan kekuasaannya dalam menghasilkan berbagai keuntungan.

Kekuasaan menurut perspektif Foucauldian tidak hanya terletak di genggamannya penguasa, tetapi suatu kekuasaan berada di mana-mana dan memiliki wujud dalam berbagai praktik, agensi, institusi, dan diskursus (Astuti, 2013: 74). Suatu diskursus memiliki kemampuan dalam membentuk pengetahuan manusia. Foucault turut menegaskan bahwa tidak ada suatu pengetahuan tanpa adanya suatu kuasa dan sebaliknya, sehingga tidak terdapat suatu

pengetahuan yang bersifat netral maupun murni, karena di dalamnya terdapat suatu kuasa. Dengan demikian diskursus dalam perspektif Foucauldian menegaskan betapa pentingnya suatu diskursus dalam pengetahuan bahkan dalam memproduksi suatu kebenaran karena pada akhirnya bahasa dalam suatu diskursus akan menjamin kelanggengan suatu kekuasaan (Syahputra, 2010: 11).

Industri energi di Indonesia masih dikuasai oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara (ESDM, 2018). Dengan kata lain industri pertambangan yang menghasilkan batu bara memonopoli pasar pemasok energi Indonesia. Jika dilihat dari perspektif kapitalisme, industri pertambangan merupakan pemilik modal yang memiliki sarana produksi, harta kekayaan bahkan sumber daya ketenagakerjaan. Pemilik modal perlu melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup, salah satunya melalui penggunaan kekuasaan untuk membentuk sebuah diskursus pada media. Penggunaan nuklir sebagai pemasok energi terbaru bisa menjadi ancaman bagi industri pertambangan batu bara karena efisiensi yang ditawarkan nuklir akan menurunkan biaya penggunaan listrik secara signifikan, sehingga memungkinkan penggunaan batu bara akan berkurang.

Teori hegemoni ideologis milik Gramsci menjelaskan bahwa media massa menjadi suatu perangkat yang digunakan oleh elit penguasa untuk meneruskan kekuasaan, kesejahteraan serta statusnya dengan cara mempopulerkan filosofi, budaya serta moralitas mereka (Zakaria, 2011: 108). Industri batu bara yang memegang dominasi terhadap kekuasaan energi di Indonesia bisa saja menggunakan media massa sebagai alat untuk

mempopulerkan filosofi maupun ideologi mereka. Tidak menutup kemungkinan bahwa industri batu bara akan mengintervensi proses produksi konten media melalui modal besar yang dimilikinya.

Diskursus yang diproduksi oleh suatu media memiliki peran penting dalam membangun opini maupun citra terhadap suatu isu. Mengacu pada model konstruksi realitas komunikasi massa (Hamad, 2006: 265), diskursus media mengenai PLTN akan menghasilkan suatu efek bagi khalayak. Hal ini dapat terlihat dari berbagai gerakan masyarakat yang memberikan penolakan terhadap pembangunan PLTN di Indonesia. Gerakan sosial merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan efek penolakan tersebut, gerakan sosial didefinisikan sebagai tindakan kolektif berdasarkan atas kesamaan tujuan dan solidaritas sosial dalam interaksi yang berkelanjutan dengan elit, musuh dan otoritas (Tarrow, 1998). Dengan kata lain, diskursus media membentuk suatu identitas bersama pada masyarakat terhadap PLTN serta mengajak masyarakat Indonesia untuk membenci berbagai aktor yang mendukung pembangunan PLTN. Selain itu, diskursus pada suatu media dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, sehingga dalam membedah diskursus media mengenai pembangunan PLTN di Indonesia perlu melihat berbagai pihak yang turut mengambil peran di dalamnya.

Konsep mengenai diskursus media mengacu pada interaksi yang terjadi melalui platform siaran, baik lisan maupun tulisan, dimana wacana tersebut berorientasi pada pembaca, pendengar atau penonton yang tidak hadir. Suatu diskursus media adalah bentuk interaksi publik yang

diproduksi tidak secara spontan. Karena suatu diskursus diproduksi secara sengaja, maka perlu dipertimbangkan bagaimana suatu diskursus tersebut diproduksi hingga tingkat ideologi (O’Keeffe, 1997: 441). Diskursus media mengenai PLTN tidak hanya ditemui pada artikel berita saja, bahkan pada jaringan televisi dan karikatur (Gamson, 1989: 1). Sejalan dengan perkembangan teknologi, diskursus media tidak lagi hanya ditemui pada media konvensional tetapi terjadi pada berbagai media baru (Paul & Handford, 2012).

Relasi kekuasaan antara industri dengan media dapat dijelaskan oleh model propaganda Herman dan Chomsky. Istilah mengenai propaganda identik terhadap suatu aktivitas komunikasi untuk memanipulasi psikologi khalayak yang menerima suatu pesan. Dalam praktiknya suatu propaganda akan mengelaborasi pesan agar memperoleh pengaruh secara persuasif untuk partisipasi aktif atau pasif pada tindakan beberapa individu yang disatukan dengan manipulasi psikologis. Esensi dari suatu kegiatan propaganda yaitu persuasi, yang mengutamakan suatu “kemenangan” dengan cara mengesampingkan berbagai kebenaran, moral serta etika (Malik, 2018:6). Propaganda model Herman dan Chomsky menjelaskan bahwa media massa melakukan aktivitasnya sebagai suatu sistem untuk mengkomunikasikan pesan dan simbol tertentu kepada publik. Model Propaganda Chomsky dan Herman menjabarkan mengenai aspek politik ekonomi media dalam menentukan konten media (Zakaria, 2011: 106). Korporasi besar menjadi salah satu ketergantungan suatu media dalam melancarkan aksi propaganda karena media massa dapat ditarik ke dalam hubungan simbiotik

dengan sumber-sumber informasi yang kuat dengan kebutuhan ekonomi dan kepentingan timbal balik (Herman & Chomsky, 2008). Poin sentral model propaganda Herman dan Chomsky adalah bahwa media cenderung "memarginalkan perbedaan pendapat dan memungkinkan kepentingan pribadi yang dominan untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik" dengan cara yang mempromosikan konstruksi hegemonik dan menekan suara-suara oposisi (Meenakshi & Kellner, 2006). Berdasarkan model propaganda tersebut maka hegemoni industri yang menyediakan energi di Indonesia akan ditemui dalam beberapa diskursus media. Media akan digunakan oleh penguasa industri untuk menjalankan kekuasaannya dalam bentuk diskursus.

Penelitian Gamson & Modigliani pada tahun 1989 merupakan salah satu rujukan utama bagi beberapa kajian diskursus PLTN pada media. Di dalam kajiannya, Gamson menggunakan analisis framing yang ia kembangkan untuk menemukan tema-tema besar (*package*) mengenai diskursus nuklir pada berbagai media di Amerika Serikat. Terdapat 5 *package* yang membentuk konstruksi sosial pada masyarakat untuk kontra terhadap PLTN di Amerika Serikat. Adapun kelima *package* tersebut sebagai berikut: (1) Advokasi terhadap sumber daya alam yang dapat diperbaharui selain nuklir, (2) Keraguan pada murahnya biaya pembangunan reaktor nuklir, (3) PLTN memunculkan sikap ragu terhadap isu keselamatan, (4) Terdapat dampak positif maupun negatif pada PLTN, (5) Isu perubahan iklim. Perangkat *framing* yang dibangun oleh Gamson dan Modigliani mampu menangkap aspek-aspek pada isu

yang bersifat kontroversi (Sharonova & Sharma, 2016: 174).

Penelitian ini memberikan fokus kepada institusi pemberitaan karena di lembaga tersebut suatu diskursus dapat diproduksi, bahkan dengan suatu intervensi. Institusi pemberitaan Pada suatu kajian analisis wacana kritis mengenai pemberitaan negosiasi nuklir program Iran antara surat kabar dari Inggris dengan Iran menyatakan bahwa surat kabar melakukan manipulasi bahasa untuk menyebarkan dan menentang beragam ideologi politik (Nasab & Reza, 2016). Mereka turut menyatakan bahwa lembaga pelaporan dan penyajian berita selalu melaporkan wacana dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan politik tertentu (Nasab & Reza, 2016: 102). Kajian tersebut memberikan suatu relevansi bahwa diskursus media mengenai PLTN dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menyebarluaskan paham, pengetahuan atau ideologi mereka melalui bahasa. Penelitian ini turut memberikan kebaruan mengenai bagaimana produksi diskursus pembangunan PLTN pada media *online* di Indonesia melalui paradigma kritis.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif dengan paradigma kritis. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif, sistematis dan cermat mengenai beberapa fakta aktual (Payuyasa, 2017: 15). Sedangkan melalui paradigma kritis, wacana adalah suatu cerminan dari ideologi tertentu dan media merupakan sarana untuk mengontrol suatu kelompok (Annas & Fitriawan, 2018: 43; Maghvira, 2017: 124). Dalam perspektif kritis, wacana yang dibentuk oleh media

mampu menciptakan “kenyataan lain” atau “kenyataan kedua” untuk mengganti suatu realitas maupun kenyataan pertama (Hamad, 2006: 263), dalam hal ini peneliti ingin melihat apa saja “kenyataan kedua” yang dibangun oleh media yang mendukung penolakan pembangunan PLTN. Berbagai metode yang bersesuaian dengan paradigma kritis akan digunakan untuk melihat “kenyataan kedua” pada diskursus PLTN. Rancangan penelitian ini dipusatkan pada upaya untuk menggambarkan secara deskriptif fakta-fakta yang mengindikasikan adanya “kenyataan kedua” pada suatu diskursus.

Analisis wacana kritis model Norman Fairclough akan digunakan untuk membongkar apa saja ketidakberesan sosial yang berada di balik diskursus media mengenai keburukan-keburukan maupun ajakan untuk menolak pembangunan PLTN. Elemen teks, praktek diskursus dan praktik sosial budaya milik Norman Fairclough menjadi aspek-aspek yang akan dianalisis dalam diskursus PLTN yang dibentuk oleh berbagai media. Analisis yang dilakukan pada dimensi teks akan memperhatikan linguistik dengan memperhatikan kosakata, makna semantik, dan pola kalimat. Dimensi praktik diskursus memfokuskan mengenai pemahaman bagaimana suatu teks diproduksi, dikonsumsi serta didistribusikan. Sedangkan dimensi praktik sosial budaya membicarakan mengenai aspek-aspek yang berada di luar teks tetapi tetap berkorelasi dengan situasi sosial, konteks budaya, ekonomi maupun politik (Eriyanto, 2001).

Analisis framing model W. A. Gamson akan digunakan untuk membedah dimensi teks pada model analisis wacana kritis Norman Fairclough. Model analisis framing W. A. Gamson melihat proses

framing sebagai suatu proses konstruksi sosial dalam memahami realita. Istilah framing sendiri adalah suatu cara bercerita untuk menghadirkan makna terhadap peristiwa yang berkaitan dengan diskursus tertentu. Cara bercerita tersebut menghasilkan kemasan (*package*) yang meliputi sebuah struktur pemahaman yang digunakan seseorang untuk membangun makna pesan yang disampaikan dan untuk menafsirkan makna pesan yang diterimanya (Chrisanty, 2012: 32). Gagasan W. A. Gamson mengenai framing merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami bagaimana perspektif pekerja media saat menyeleksi isu dan menulis diskursus (Eriyanto, 2002).

Analisis framing yang dilakukan berdasar pada paradigma kritis dalam membedah dimensi teks bertujuan untuk melihat relita yang tersembunyi dibalik sebuah diskursus, dapat berupa kepentingan ideologi, ekonomis, maupun politik praktis (Yodiansyah, 2017: 29). Sehingga analisis framing yang dilakukan pada kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana teks atau simbol yang dipilih dalam suatu diskursus mampu membangun makna yang tersembunyi dari suatu realita. Tabel 1 merupakan aspek-aspek dalam package yang membentuk bingkai suatu diskursus media pada model framing W. A. Gamson.

**Tabel 1 Model Framing W. A. Gamson**

Bingkai : Seperangkat ide pusat ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu.	
Perangkat <i>framing</i> : Perangkat ini berupa bentuk teks baik kata, kalimat, gambar maupun metafora	Perangkat Penalaran : Perangkat ini menerangkan kohesi atau koherensi dari teks yang merujuk pada suatu gagasan tertentu
<i>Metaphors</i> : Bentuk dari Perumpamaan	<i>Roots</i> : Analisis sebab akibat
<i>Catchphrases</i> : Frasa yang menarik atau kontras pada suatu diskursus. Dapat berupa jargon atau slogan.	<i>Appeals to Principle</i> : Premis dasar atau berbagai klaim moral
<i>Exemplar</i> : Mengaitkan bingkai dengan suatu contoh, teori, perbandingan yang lebih memperjelas suatu <i>frame</i> .	<i>Consequences</i> : Konsekuensi yang muncul dari suatu <i>frame</i>
<i>Depiction</i> : Penggambaran isu yang bersifat konotatif,. Aspek ini pada umumnya merupakan kosakata atau leksikon untuk melabeli sesuatu. Gambar atau grafik yang mendukung pesan yang ingin disampaikan	

Sumber: (Eriyanto, 2002)

Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, sehingga diskursus yang dipilih merupakan kumpulan bukti-bukti adanya relasi kekuasaan industri batu bara dalam bentuk teks. Adapun untuk menjamin kebaruan kasus, objek yang dipilih merupakan diskursus yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Seluruh sampel diambil dari media yang dapat diakses melalui internet. Tinjauan

literatur dilakukan untuk membedah dimensi praktik diskursus maupun sosial budaya.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Objek dari penelitian ini berfokus pada media online yang memproduksi diskursus mengenai penolakan terhadap pembangunan PLTN di Indonesia. Adapun saat ini diskursus media telah merambah ke

media baru (Paul & Handford, 2012). Tinjauan literatur akan dilakukan untuk melihat bagaimana suatu praktik produksi suatu diskursus terjadi media dalam konteks keindonesiaan serta menelusuri bagaimana kondisi sosial dan budaya Indonesia pada saat diskursus pembangunan PLTN diproduksi. Beberapa diskursus akan dianalisis untuk melihat bentuk-bentuk indikasi kekuasaan, bagaimana kontradiksi yang terjadi dan apa saja efek yang terjadi karena adanya diskursus mengenai penolakan PLTN.

### Analisis Dimensi Teks

Dimensi teks akan dibedah menggunakan analisis framing W. A. Gamson untuk menentukan package dari

suatu diskursus media. Package tersebut akan digunakan sebagai indikasi adanya peran kekuasaan industri pertambangan batu bara dalam memanipulasi diskursus pembangunan PLTN di Indonesia. Berikut 5 diskursus yang akan dianalisis guna melihat adanya indikasi kekuasaan industri pertambangan.

### Diskursus 1

Diskursus yang selanjutnya akan dianalisis adalah salah satu artikel berita yang diterbitkan di liputan6.com pada tanggal 11 Oktober 2015 dengan judul "PLTN Belum Bisa Dipakai di Program 35 Ribu MW". Tabel 2 merupakan hasil analisis diskursus tersebut menggunakan framing W. A. Gamson.

**Tabel 2 Hasil analisis diskursus pertama**

Bingkai : Pemerintah tidak membutuhkan PLTN dalam program 35.000 MW	
Perangkat <i>framing</i> :	Perangkat Penalaran :
<i>Metaphors</i> :	<i>Roots</i> :
"...energi nuklir masih di atas meja"	" PLTN membutuhkan waktu 10 tahun"
<i>Catchphrases</i> :	<i>Appeals to Principle</i> :
"Saat ini sebenarnya Indonesia sudah menguasai teknologi nuklir dan punya sumber daya manusia yang mumpuni"	"Bangun 1 PLTN butuh 10 tahun jadi 35 ribu sudah lewat, untuk 35 ribu apa yang cepat, batu bara, ya itu kejar"
<i>Exemplaar</i> :	<i>Consequences</i> :
"rencana pengembangan energi nuklir masih di atas meja, artinya masih sebatas diskusi."	"PLTN tidak digunakan untuk program 35 ribu MW yang ditargetkan rampung dalam 5 tahun"
<i>Depiction</i> :	
"PLTN Belum Bisa Dipakai di Program 35 Ribu MW" - judul	

Sumber: Olahan peneliti, 2020

Diskursus tersebut memperlihatkan suatu fenomena bahwa sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya yang mendukung berdirinya PLTN. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia dikatakan sudah siap untuk mengelola PLTN di dalam negeri. Tetapi sayangnya pemerintah telah bergantung pada industri batu bara. Bahkan untuk

mengejar program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, pemerintah rela untuk menukar alam Indonesia dengan PLTU yang sejatinya memberikan berbagai macam dampak buruk bagi lingkungan. Sehingga pada akhirnya PLTN hanya menjadi suatu wacana yang berhenti di atas meja. Diskursus tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa pemerintah

tidak akan pernah mulai untuk membangun PLTN, padahal potensi energi yang dihasilkannya berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan PLTU. Indikasi adanya kekuasaan industri batu bara sangat terasa dalam diskursus ini, terlebih ketergantungan pemerintah terhadap batu bara sangat kental dibahasakan, seakan-akan batu bara menjadi solusi tunggal bagi program pemerintah.

## Diskursus 2

Kecurigaan adanya relasi kekuasaan antara industri pertambangan batu bara dengan pemerintahan yang berkuasa diperkuat dengan suatu artikel dari situs web Sekretariat Kabinet yang ditulis pada tanggal 2 Juni 2016 dengan judul “Soal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Presiden Jokowi: Masih Dalam Kajian Belum, Diputuskan”. Berikut hasil analisis framing W. A. Gamson. Terhadap diskursus tersebut.

**Tabel 3 Hasil analisis diskursus kedua**

Bingkai : Penolakan PLTN dengan isu Kecukupan Energi Fosil (batu bara)	
Perangkat <i>framing</i> :	Perangkat Penalaran :
<i>Metaphors</i> :	<i>Roots</i> :
Hitung-hitungan	PLTN masih belum masuk dalam perencanaan energi karena adanya energi yang dapat diperoleh lebih cepat
<i>Catchphrases</i> :	<i>Appeals to Principle</i> :
“...Indonesia belum masuk ke pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)”	“Masih banyak sumber-sumber kita, sehingga kita memang belum masuk ke pembangkit listrik tenaga nuklir”
<i>Exemplaar</i> :	<i>Consequences</i> :
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Indonesia masih memiliki banyak sumber energi.”	“Saat wartawan tegas menanyakan apakah PLTN akan dibangun dalam waktu dekat, Presiden Jokowi langsung menjawab: Belum”
<i>Depiction</i> :	
Artikel ini disertakan dengan suatu gambar kepala negara yang sedang melakukan tanya jawab dengan wartawan.	

Sumber: Olahan peneliti, 2020

Diskursus tersebut semakin menegaskan kecurigaan mengenai relasi kekuasaan antara industri dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Bahkan pernyataan bahwa program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dapat ditopang dengan batu bara seakan-akan menjadi angin segar bagi pelaku industri batu bara untuk semakin tumbuh di tanah air. Penggunaan frasa yang sama antara diskursus pada website Sekretariat Kabinet dengan majalah tambang semakin

menegaskan bahwa baik sektor publik maupun swasta menyuarakan suatu gagasan yang sama. Sehingga, hal tersebut semakin membentuk citra pada khalayak bahwa PLTN memang belum atau bahkan tidak dibutuhkan karena energi fosil masih dapat menopang kebutuhan negara.

Melalui metafora yang diangkat dalam hasil analisis, bahwa memang ada unsur ekonomi dalam menggunakan sumber daya alam fosil dalam menghasilkan energi. Hal tersebut



menimbulkan konsekuensi bahwa PLTN tidak akan dibangun dalam waktu dekat atau terlebih lagi tidak akan masuk dalam perhitungan ekonomi negara Indonesia. Selain itu, artikel tersebut disertai dengan gambar Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan wawancara dengan wartawan, sehingga menimbulkan kesan bahwa keputusan mengenai pembangunan PLTN tidak bisa diganggu gugat karena keluar langsung dari ucapan pimpinan tertinggi negara. Pada akhirnya konstruksi sosial mengenai lemahnya urgensi pengembangan dan pendirian PLTN terus terbentuk di benak masyarakat Indonesia.

### Diskursus 3

Berbicara mengenai berbagai kontroversi yang disebabkan oleh berdirinya PLTN, diskursus berikutnya membeberkan berbagai alasan untuk menolak pendirian PLTN. Salah satu tulisan di portal berita online okezone.com yang berjudul “Indonesia Kaji Bangun PLTN, Ini Sederet Faktor yang Harus Diperhitungkan” berisikan berbagai pesan propaganda untuk menolak pendirian PLTN di Indonesia. Tabel 5 merupakan hasil analisis framing W. A. Gamson terhadap diskursus tersebut.

**Tabel 4 Hasil analisis diskursus ketiga**

Bingkai : PLTN penuh dengan kontroversi	
Perangkat <i>framing</i> :	Perangkat Penalaran :
<i>Metaphors</i> : Kecelakaan yang Berakibat fatal	<i>Roots</i> : “...lima alasan utama mengapa Indonesia tidak memerlukan PLTN”
<i>Catchphrases</i> : “...sampai tahun 2100 Indonesia masih belum memerlukan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan”	<i>Appeals to Principle</i> : “alasan yang ketiga Indonesia memiliki cukup sumber energi non nuklir batu bara dan gas alam yang lebih murah”
<i>Exemplaar</i> : “Indonesia memiliki cukup sumber energi non nuklir batu bara dan gas alam yang lebih murah”	<i>Consequences</i> : “PLTN adalah teknologi yang belum digunakan di Indonesia dan ciri utamanya di samping mahal adalah risiko kecelakaan yang dapat berakibat fatal ”
<i>Depiction</i> : Artikel ini disertakan dengan suatu gambar peringatan bahaya nuklir berbahasa Rusia yang diikatkan pada suatu pagar.	

Sumber: Olahan peneliti, 2020

Diskursus tersebut menyebutkan lima alasan kontroversial mengenai pendirian PLTN di Indonesia. Diantara kelima alasan tersebut, terdapat satu alasan yang menjelaskan bahwa Indonesia masih mempunyai sumber energi non nuklir

seperti batu bara dan gas alam. Alasan tersebut sudah berulang kali disuarakan oleh berbagai media, seakan-akan memang batu bara atau hasil tambang yang lain memang solusi tunggal bagi keberlanjutan energi di Indonesia. Alasan lainnya yang

menyinggung batu bara adalah besarnya biaya penyediaan listrik bagi PLTN dibandingkan PLTU. Pernyataan tersebut kembali menegaskan bahwa PLTU merupakan solusi bagi energi Indonesia. Tetapi sungguh disayangkan karena berita tersebut tidak melihat bagaimana dampak-dampak yang diakibatkan oleh penggunaan batu bara yang berlebihan. Sehingga citra PLTU dan batu bara akan terbentuk sebagai satu-satunya energi yang layak bagi Indonesia.

Metafora yang diangkat dalam diskursus ini adalah “kecelakaan yang berakibat fatal”. Hal tersebut sangat mengarah pada propaganda bahwa memang kecelakaan PLTN akan mengancam kehidupan manusia, tetapi tidak bagi PLTU yang dibahasakan tidak pernah mengalami kecelakaan dan selalu aman jika terjadi

kecelakaan. Gambar yang digunakan dalam diskursus tersebut sangat mendukung dampak negatif yang ditimbulkan oleh PLTN. Bahasa Rusia yang menjadi penjelas rambu-rambu pada gambar tersebut mengingatkan khalayak pada kecelakaan PLTN di Chernobyl pada tahun 1986. Melalui penggambaran tersebut khalayak terus dibangun bahwa PLTN bukanlah jalan keluar bagi kebutuhan energi.

#### **Diskursus 4**

Diskursus kelima yang akan dibahas adalah salah satu artikel berita dari portal berita online inews.co.id yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan judul “Berisiko dan Berbiaya Tinggi, Pengamat: RI Belum Memerlukan PLTN”. Tabel 6 merupakan hasil analisis framing W. A. Gamson terhadap diskursus tersebut.

**Tabel 5 Hasil analisis diskursus keempat**

Bingkai : Pemerintah belum membutuhkan PLTN sebagai pemasok energi	
Perangkat <i>framing</i> :	Perangkat Penalaran :
<i>Metaphors</i> :	<i>Roots</i> :
“kebocoran radiasi nuklir”	"Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak sekali seperti batu bara, gas alam, yang harga lebih murah dibandingkan harus menggunakan nuklir,"
<i>Catchphrases</i> :	<i>Appeals to Principle</i> :
“...penggunaan PLTN berisiko tinggi.”	"Bahkan sampai tahun 2100 Indonesia masih belum memerlukan PLTN”
<i>Exemplaar</i> :	<i>Consequences</i> :
“...skala PLTN sendiri, biaya investasi bisa berkali-kali lipat dari pembangkit listrik konvensional”	“dua sumber energi tersebut (batu bara dan gas) masih banyak jumlahnya sehingga pengembangan PLTN bukanlah menjadi pilihan utama”
<i>Depiction</i> :	
“Pengamat: RI Belum Memerlukan PLTN” – judul “Indonesia terletak di ring of fire yang rawan bencana alam sehingga penggunaan PLTN berisiko tinggi”	

Sumber: Olahan peneliti, 2020

Berdasarkan diskursus tersebut hasil tambang batu bara dan gas tetap menjadi fokus bahwa keduanya mampu menopang kebutuhan energi Indonesia hingga tahun 2100. Isu mengenai pembangunan maupun pengembangan PLTN sama sekali tidak mendapatkan tempat dalam diskursus ini.

Batu bara dan gas dinilai lebih berlimpah di Indonesia dan mampu diperoleh dengan harga murah, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada data-data kuantitatif sebagai pembanding yang menjadi dasar pembentukan pernyataan tersebut. Dampak negatif yang disebutkan hanya dampak

yang berasal dari PLTN, sedangkan PLTU dianggap baik-baik saja dan selalu menjadi solusi bagi energi Indonesia. Selain itu, PLTN kembali dibenturkan dengan permasalahan tingginya investasi sehingga semakin membentuk citra di mata khalayak bahwa PLTN tidak layak untuk Indonesia.

Diskursus kelima membeberkan beberapa alasan untuk menolak PLTN di Indonesia. Salah satunya karena Indonesia terletak pada bagian *ring of fire* sehingga kemungkinan terjadinya bencana alam lebih tinggi. Selain itu, bahaya yang ditimbulkan jika terjadi kebocoran reaktor nuklir terus disuarakan untuk mendukung pembentukan citra yang buruk di benak khalayak. Propaganda tersebut dimungkinkan menjadi

pemicu utama kurangnya penerimaan masyarakat terhadap PLTN di Indonesia.

### Diskursus 5

Diskursus kali ini akan membicarakan efek apa yang mungkin ditimbulkan dari adanya propaganda mengenai PLTN di media massa. Seperti dijelaskan sebelumnya pada model konstruksi sosial media massa, bahwa suatu diskursus yang disampaikan akan memberikan efek kepada khalayak. Objek selanjutnya yang akan dianalisis adalah artikel berita dari vivanews.com pada tanggal 26 April 2010 dengan judul “Mahasiswa Demo Tolak Pembangunan PLTN”. Tabel 8 merupakan hasil analisis framing W. A. Gamson terhadap diskursus tersebut.

**Tabel 6 Hasil analisis diskursus kelima**

Bingkai : Masyarakat menolak pembangunan PLTN karena penuh dengan dampak yang membahayakan

Perangkat *framing* :

*Metaphors* :

“...bayang-bayang ancaman...”

*Catchphrases* :

“Ini harus jadi pelajaran dan pertimbangan dari pemerintah kita, apalagi Indonesia belum sepenuhnya menguasai PLTN”

*Exemplar* :

“Pembangunan PLTN di Indonesia bukanlah solusi terakhir. Opsi ini sangatlah merugikan bahkan membahayakan bagi masyarakat”

*Depiction* :

“Ini sebuah ancaman serius bagi kehidupan masyarakat Indonesia”

Artikel disertakan dengan gambar mengenai unjuk rasa mahasiswa yang sedang mengepalkan tangannya ke atas udara.

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Perangkat Penalaran :

*Roots* :

“Pembangunan PLTN bukanlah solusi terakhir bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik”

*Appeals to Principle* :

“Terlalu berbahaya dampaknya bagi manusia dan lingkungan hidup. Kita masih bisa mengembangkan sumber tenaga lain seperti batu bara atau PLTA”

*Consequences* :

“Dia mengaku meminta DPR, PLN dan Dewan Energi segera menyikapi rencana ini dan membatalkan pembangunan tersebut. Ini sebuah ancaman serius bagi kehidupan masyarakat Indonesia”

Unjuk rasa yang dilakukan kalangan mahasiswa dalam diskursus tersebut dilatarbelakangi oleh bayang-bayang ancaman radiasi nuklir karena dapat mengancam makhluk hidup. Propaganda tersebut telah sering disuarakan oleh

berbagai media, salah satu contohnya adalah propaganda mengenai kecelakaan nuklir di Chernobyl maupun Fukushima. Dalam hal ini, media telah membangun suatu identitas mengenai PLTN sebagai pembangkit listrik yang penuh dengan

ancaman, sehingga banyak orang yang menginternalisasikan identitas tersebut ke dalam dirinya. Unjuk rasa tersebut dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial dimana semua orang memiliki kepercayaan yang sama terhadap identitas PLTN sehingga mereka bergerak untuk meruntuhkan entitas yang meyakini suatu kepercayaan lain dalam hal ini pemerintah. Berita tersebut turut diperkuat dengan penggunaan foto yang seakan-akan memprovokasi khalayak untuk ikut meruntuhkan program pemerintah mengenai pembangunan PLTN.

Diskursus tersebut turut mengutip salah satu pernyataan yang diungkapkan oleh koordinator unjuk rasa dimana ia mengatakan bahwa Indonesia masih dapat mengembangkan pembangkit listrik dari sumber daya batu bara maupun PLTA. Batu bara kembali disebutkan dalam diskursus ini sebagai energi yang seharusnya dipakai oleh warga Indonesia. Kecurigaan dan indikasi kekuasaan industri batu bara muncul kembali dalam diskursus ini, apakah memang mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa karena keinginan mereka atau memang industri batu bara sendiri berada dibalik pernyataan koordinator aksi tersebut, sehingga dengan diliputnya unjuk rasa ini frasa penggunaan batu bara untuk energi Indonesia akan muncul di media. Paradigma kritis menyatakan bahwa terdapat “kenyataan kedua” pada setiap fenomena yang terjadi (Hamad, 2006: 263). Unjuk rasa mengenai penolakan PLTN harus dilihat dari sisi yang berbeda sehingga ditemukan ketidakberesan sosial yang terjadi.

### ***Package diskursus***

Berdasarkan analisis dimensi teks pada beberapa diskursus media mengenai

penolakan PLTN, dihasilkan 5 *package* interpretatif sebagai berikut: (1) Pemerintah sangat bergantung pada batu bara padahal seluruh sumber daya Indonesia telah siap untuk mengoperasikan PLTN, (2) PLTN tidak masuk dalam perhitungan ekonomi dalam menyelesaikan program pemerintah mengenai pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Pemerintah lebih tertarik menggunakan batu bara atau hasil tambang lainnya, (3) PLTN memiliki berbagai ancaman bagi masyarakat Indonesia. Murah dan berlimpahnya persediaan batu bara masih menjadi alasan mengapa PLTN belum dibutuhkan oleh pemerintah, (4) Berlimpahnya batu bara maupun gas menyebabkan Indonesia tidak membutuhkan PLTN hingga tahun 2100, (5) Unjuk rasa dilatarbelakangi oleh ancaman-ancaman radiasi nuklir dan dukungan untuk menggunakan batu bara.

Suatu *package* merupakan cara bercerita yang mampu menghadirkan konstruksi makna terhadap peristiwa yang relevan dengan diskursus tertentu (Chrisanty, 2012: 33). Hasil sintesa *package* dari diskursus yang telah dianalisis dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tema-tema yang diangkat media dalam menolak PLTN. Berbeda dengan *package* yang disampaikan oleh Gamson & Modigliani, pada penelitian ini terdapat *package* yang menerangkan adanya keterlibatan pemerintah dalam membentuk diskursus mengenai PLTN. Hal tersebut muncul karena Indonesia sedang menjalankan program pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW. *Package* mengenai advokasi terhadap sumber energi lain masih mendominasi diskursus penolakan PLTN di Indonesia. Hal tersebut menjadi sebuah indikasi mengenai adanya kekuasaan industri

batu bara, khususnya dalam praktik diskursus.

### **Analisis Dimensi Praktik Diskursus**

Analisis mengenai praktik diskursus akan mendalami tentang suatu cara bagaimana institusi atau pekerja media di Indonesia memproduksi dan mendistribusikan suatu diskursus. Representasi realitas, yang sebenarnya diskursus, selalu merupakan konstruksi sosial (Joye, 2010: 596). Konstruksi sosial turut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari suatu institusi (Hamad, 2006: 265). Bagian ini akan melihat apa saja faktor internal yang mempengaruhi produksi diskursus.

Produksi suatu diskursus maupun akses terhadap informasi penyusun diskursus dipengaruhi oleh aspek ekonomi (Joye, 2010: 596). Penggunaan kata maupun simbol pada berita okezone.com (diskursus nomor 3) dan inews.co.id (diskursus nomor 4) memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kedua media tersebut berada dibawah konglomerasi MNC yang dalam hal ini memiliki newsroom bersama untuk mereproduksi kembali suatu berita oleh anak perusahaannya yang bergerak dibidang media. Melalui newsroom bersama tersebut biaya produksi suatu berita dapat ditekan.

Diskursus yang disampaikan oleh liputan6.com (diskursus nomor 1) mempunyai kemiripan konten dengan apa yang disampaikan oleh website Sekretariat Kabinet (diskursus nomor 2). Hal tersebut bukan sesuatu yang mengherankan karena lembaga pemerintahan memiliki kuasa untuk menentukan suatu diskursus (Susanto, 2013: 482). Melalui kekuasaannya, pemerintah akan

menentukan penggunaan bahasa dalam suatu diskursus. Isu mengenai penyelesaian proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW melalui batu bara akan terus diberitakan oleh berbagai media. Diskursus yang berhubungan dengan program kerja pemerintah selalu memiliki kemiripan dimana PLTN tidak masuk dalam “hitung-hitungan” karena persediaan energi lainnya masih berlimpah. Secara lebih formal, lembaga pemerintahan dapat memproduksi press release guna menyamakan konten diskursus pada media yang telah bekerja sama dengan mereka.

Seluruh diskursus yang dianalisis pada kajian ini merupakan media yang dapat diakses melalui jaringan internet. Munculnya konsep konvergensi media telah berhasil meningkatkan efektivitas suatu konten untuk diterima oleh khalayak. Baik portal media online maupun lembaga pemerintahan telah memiliki berbagai akun media sosial untuk mendistribusikan konten media, sehingga memperluas cakupan penerima suatu diskursus. Diskursus mengenai penolakan PLTN sangat mudah disebarluaskan pada era internet sehingga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pro-nuklir untuk mensosialisasikan manfaat baik dari PLTN. Selain itu media online mampu memberikan jangkauan khalayak yang lebih luas dari pada media konvensional sehingga dapat menekan biaya distribusi (Maryani, 2018: 264).

### **Analisis Dimensi Praktik Sosial Budaya**

Analisis Dimensi Praktik Sosial Budaya dapat dilihat dari berbagai macam aspek salah satunya dari kepemilikan media. Berdasarkan beberapa diskursus yang telah dibahas sebelumnya, dua berita dari okezone.com dan satu berita dari inews.com secara tegas menolak PLTN

bersendiri di Indonesia. Kedua portal berita online tersebut sejatinya merupakan bagian dari konglomerasi perusahaan MNC. Seperti diketahui bahwa MNC telah berinvestasi pada industri batu bara di berbagai wilayah kepulauan Indonesia melalui anak perusahaannya yang bernama PT Nuansacipta Coal Investment. Hal tersebut sangat relevan dengan diskursus yang diproduksi oleh okezone.com dan inews.com dimana mereka menyebutkan bahwa sumber daya alam batu bara Indonesia masih berlimpah dan menolak nuklir sebagai sumber energi alternatif. Sehingga aktivitas bisnis batu bara mendapatkan citra positif maupun dukungan untuk terus beroperasi dari masyarakat Indonesia, meskipun ada dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan. Konglomerasi media berpengaruh pada konten atau program yang akan disampaikan kepada khalayak dimana isi konten atau program media menggambarkan kepentingan politik maupun ekonomi dari pemilik media (Pembayun, 2014: 112). Namun kesimpulan ini hanyalah sebuah indikasi yang berdasar pada diskursus media, masih banyak faktor-faktor lain yang perlu dikaji untuk memvalidasi lebih dalam indikasi ini.

Ketergantungan pemerintah terhadap batu bara untuk menjalankan proyeknya patut dicurigai sebagai penyebab mengapa diskursus mengenai penolakan nuklir turut diproduksi. Pemerintah akan selalu mensponsori penggunaan batu bara dalam berbagai diskursusnya karena Industri batu bara telah berkontribusi dalam penyelesaian program kerjanya. Pada akhirnya masyarakat akan berterima kasih kepada PLTU meskipun mereka tidak menyadari ada harga yang harus dibayar untuk pelestarian lingkungan. PLTN tidak akan

mendapatkan tempat di hati pemerintah karena Industri batu bara sudah terlalu besar untuk dikalahkan. Strategi Industri batu bara dalam relasi kekuasaan dengan pemerintah merupakan senjata yang ampuh untuk memproduksi diskursus pada media yang dimiliki oleh pemerintah karena sejatinya pemerintah mempunyai kuasa untuk membentuk suatu wacana (Susanto, 2013: 482).

Berdasarkan indikasi yang terlihat pada diskursus nomor 7, industri batu bara dapat menggunakan kekuasaannya dalam menggerakkan masyarakat untuk membuat suatu diskursus tertentu. Sekelompok masyarakat rela melakukan unjuk rasa hanya untuk menyuarakan gagasannya agar pemerintah menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Bahkan kita tidak tahu apakah pengunjuk rasa benar-benar menyuarakan gagasan tersebut dari hati mereka atau ada tekanan dari industri batu bara. Indonesia masih kental dengan budaya suap menyuap untuk memaksakan suatu kehendak kepada orang lain. Adapun salah satu alasan mengapa korporasi melakukan praktis suap adalah untuk memaksimalkan profit dan survive dari persaingan global (Kim & Johnson, 2016: 192).

## **Kesimpulan**

Penelitian ini telah menggambarkan analisis wacana kritis terhadap diskursus pembangunan PLTN dalam konteks negara Indonesia. Kecurigaan terhadap relasi kekuasaan dapat terlihat jelas melalui diskursus pada berbagai media. *Package* yang ingin disampaikan media kepada khalayaknya adalah melimpahnya persediaan batu bara untuk menopang kebutuhan energi Indonesia dalam waktu yang sangat lama sehingga PLTN dianggap belum diperlukan oleh bangsa Indonesia.

Indikasi propaganda dapat dirasakan pada beberapa diskursus dimana para media mengingatkan betapa dahsyatnya bencana PLTN yang terjadi dimasa lampau dan berbagai dampak radiasi yang sulit untuk ditangani. Produksi diskursus tersebut tidak bisa lepas dari peran newsroom yang dipakai bersama oleh suatu institusi dan bagaimana praktik produksi yang dilakukan oleh pemerintahan. Hadirnya media online turut memberikan kemudahan bagi suatu diskursus untuk sampai kepada khalayak. Dari segi sosial budaya, pembentukan berbagai diskursus tersebut dapat dikaitkan dengan fenomena konglomerasi yang terjadi di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, ketidakberesan sosial yang muncul dari polemik pembangunan PLTN terletak pada sistem politik di Indonesia, karena seperti yang kita sadari bahwa pemilik media dan konglomerat Indonesia telah menduduki kursi kekuasaan di pemerintahan, sehingga strategi jangka panjang seperti pembangunan PLTN akan kalah menarik jika dibandingkan dengan pembangunan PLTU yang mampu menyedot keuntungan dari sektor batu bara. Jika program PLTN ingin terus diteruskan, media memiliki tugas penting dalam membangun citra positif mengenai PLTN kepada warga Indonesia. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana peta posisi kekuatan media yang bersifat pro dan kontra terhadap pembangunan PLTN.

#### Daftar Pustaka

Abe, Y. (2013). Risk Assessment Of Nuclear Power By Japanese Newspapers Following The Chernobyl Nuclear Disaster. *International Journal Of Communication*, 7, 1968–1989. Retrieved From

[Http://Eds.A.Ebscohost.Com/Abstract?Site=Eds&Scope=Site&Jrnl=19328036&An=99140331&H=Udr%2ff3g0sifp2a%2bd1cfossnrzwyzht0kuupgzc2rkwndgsv9a0%2fhevsk%2fhtrhnsffddbозky215frqzxs%2brlg%3d%3d&Crl=C&Resultlocal=Errcrlnoresults&Results=Ehost&Crlhashurl>Login.As](http://Eds.A.Ebscohost.Com/Abstract?Site=Eds&Scope=Site&Jrnl=19328036&An=99140331&H=Udr%2ff3g0sifp2a%2bd1cfossnrzwyzht0kuupgzc2rkwndgsv9a0%2fhevsk%2fhtrhnsffddbозky215frqzxs%2brlg%3d%3d&Crl=C&Resultlocal=Errcrlnoresults&Results=Ehost&Crlhashurl>Login.As)

- Annas, A., & Fitriawan, R. A. (2018). *Media Dan Kekerasan: Analisis Norman Fairclough Terhadap Pemberitaan Tarung Gladiator*. 4(1), 37–54.
- Astuti, R. (2013). *Redd+ Sebagai Strategi-Strategi Kepengaturan Dalam Tata Kelola Hutan Di Indonesia: Sebuah Perspektif Foucauldian*. 71–97.
- Chrisanty, P. (2012). Keotoriteran Presiden Sukarno Dalam Novel: The Year Of Living Dangerously. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 1(April), 31–36.
- Cravioto, J., Bakr, M., Aoyagi, S., Park, S., & Utama, N. A. (2011). Community Acceptance Of Nuclear Power Generation In Japan And Relevant Influencing Factors. *2011 Ieee Ist Conference On Clean Energy And Technology, Cet 2011*, (April 2019), 248–252. <https://doi.org/10.1109/Cet.2011.6041491>
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Eriyanto, E. (2001). *Analisis Wacana*. Yogyakarta: Lkis.
- Esdm. (2018). *Statistik Ketenagalistrikan T.A. 2018*.
- Gamson, W. A. (1989). *Media Discourse And Public Opinion On Nuclear Power: A Constructionist Approach* ' L. 95(1), 1–37.

- Hamad, I. (2006). Komunikasi Sebagai Wacana. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(2), 259–268. <https://doi.org/10.29313/Mediator.V7i2.1282>
- Herman, E., & Chomsky, N. (2008). Manufacturing Consent: The Political Economy Of The Mass Media. In *Changes In The Labor Process Under Monopoly* .... Retrieved From <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnq=search&q=intitle:Manufacturing+Consent#5%5cnhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnq=search&q=intitle:Manufacturing+Consent+-+The+Political+Economy+Of+The+Mass+Media%230>
- Joye, S. (2010). News Discourses On Distant Suffering: A Critical Discourse Analysis Of The 2003 Sars Outbreak. *Discourse And Society*, 21(5), 586–601. <https://doi.org/10.1177/0957926510373988>
- Kellner, Meenakshi Gigi Durham, D. M. (2006). *Keywords In Cultural Studies*.
- Kim, A. J., & Johnson, K. K. P. (2016). Power Of Consumers Using Social Media: Examining The Influences Of Brand-Related User-Generated Content On Facebook. *Computers In Human Behavior*, 58, 98–108. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.047>
- Kusuma, H. (2015). Tak Perlu Tunggu Energi Habis Untuk Bangun Pltn : Okezone Economy. Retrieved May 23, 2019, From <https://economy.okezone.com/read/2015/06/16/19/1166103/tak-perlu-tunggu-energi-habis-untuk-bangun-pltn>
- Maghvira, G. (2017). Critical Discourse Analysis At Tempo . Co On The News. *The Messenger*, 9(April), 120–130.
- Malik, A. (2018). Agitasi Dan Propaganda Di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen Terkait Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama). *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(3). <https://doi.org/10.30656/Lontar.V4i3.360>
- Maryani, E. (2018). Literasi . Co Sebagai Media Alternatif Dan Kooperasi Akar Rumput. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 261–276.
- Nasab, S., & Reza, H. (2016). A Critical Discourse Analysis On Newspapers: The Case Study Of Nuclear Program Of Iran. *International Journal Of Research Studies In Education*, 5(2), 93–103. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2015.1141>
- O'keeffe, A. (1997). Media And Discourse Analysis. In *Media And Discourse Analysis* (Pp. 441–454). Routledge.
- Paul, J., & Handford, M. (2012). *The Routledge Handbook Of Discourse Analysis*.
- Payuyasa, I. N. (2017). Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Dalam Program Acara Mata Najwa Di Metro Tv. 5(November), 14–24.
- Pembayun, J. G. (2014). Konglomerasi Media Dan Dampaknya Pada Pilpres 2014. *Jurnal Interaksi*, 4(2), 109–116.
- Robertua, V. (2017). Jipsi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vii(1), 47–62.
- Sharonova, Y. M., & Sharma, D. (2016). Nuclear Power Discourse Analysis: A Literature Review. *International*



- Journal Of Humanities & Social Science Studies (Ijhsss) A Peer-Reviewed Bi-Monthly Bi-Lingual Research Journal*, 3(2), 167–177. Retrieved From <Http://Oaji.Net/Articles/2016/1115-1476778244.Pdf>
- Suhaemi, T. (2017). *Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Di Korea Selatan : Pembelajaran Bagi Indonesia*. 2(2502).
- Susanto, E. H. (2013). Media Massa, Pemerintah Dan Pemilik Modal. *Jurnal Aspikom*, 1(6), 477. <Https://Doi.Org/10.24329/Aspikom.V1i6.53>
- Syahputra, I. (2010). Post Media Literacy ; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault. *Aspikom*, 1(1), 1–14.
- Syahrani, M., & Lubis, W. (2019). Pltn Masih Hadapi Tantangan Besar Dari Masyarakat - Ekonomi Bisnis.Com. Retrieved May 23, 2019, From <Https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20190430/44/917386/Pltn-Masih-Hadapi-Tantangan-Besar-Dari-Masyarakat>
- Tarrow, S. (1998). *Power In Movement: Social Movements And Contentious Politics* (3rd Ed.). New York: Cambridge University Press.
- Yodiansyah, H. (2017). Komunikasi Politik Media Surat Kabar Dalam Studi Pesan Realitas Politik Pada Media Cetak Riau Pos Dan Tribun. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 11–30.
- Zakaria, L. S. (2011). Budaya Jakarta : Budaya Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. *Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(2), 103–110.